

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. (2015). *Riset Pendidikan*. Edisi 4, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Diana, A. (2018). *Perpajakan Indonesia..* Yogyakarta : Andi.
- Dunn, W.N. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi 2, Yogyakarta : University Gadjah Mada.
- Falah, F.A. (2012). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Universitas Indonesia.
- Fitriandi, P., Aryanto, Y., Priyono, A.P. (2018). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (2016, Desember 29). Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 Tahun 2016, from <https://bprd.jakarta.go.id>.
- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (2016, Oktober 13). Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 193 Tahun 2016, from <https://bprd.jakarta.go.id>.
- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (2017, September 13). Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2017, from <https://bprd.jakarta.go.id>.
- Husin, H., Asni, N., Sarita, K.F. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* .2.1.
- Hermanto, B., Rasmini, M. (2018). Analisis Potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Salah Satu Pajak Daerah. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* .3.3.
- Jayanti, R.D. (2015). Analisis Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terkait Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : Andi.

- Muhaling, E.N., Ventje., Elim, I. (2018). Analisis Efektivitas Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi*. 5.2.
- Muzammil, C. (2015). *Membayar Pajak*. Penerbit Genesis Huta Media, Jakarta Pusat.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Edisi 6, Jakarta Selatan : Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E.A. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat : Gava Media.
- Samudra, A.A. (2015). *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : Rajawali Press.
- Siahaan, M.P. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, M.P. (2014). *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah*. Jakarta : Sagung Seto.
- Undang-Undang. (2018). *Undang-undang PBB-P2 dan BPHTB*. Yogyakarta : Sinar Grafika.

